



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN 2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO SELATAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan kepada Bupati Barito Selatan, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, bahwa yang dimaksud dengan Laporan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD pada prinsipnya adalah rangkuman Laporan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Melalui LPPD ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang objektif sekaligus dapat dijadikan objek evaluasi secara lengkap yang mencerminkan kinerja Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, sekaligus juga dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang berminat untuk melihat dan mengukur pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan kurun waktu Tahun 2023.

Meskipun hakekatnya demikian namun kami sangat menyadari bahwa LPPD ini tidaklah dapat memuat secara keseluruhan dan rinci kegiatan dari urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama kurun waktu 1 (satu) Tahun, hal ini dikarenakan kompleksitasnya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dapat kami tuliskan secara satu persatu, oleh karenanya apa yang kami susun dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ini merupakan hal-hal prioritas yang menurut kami perlu disampaikan, antara lain seperti Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Daerah dan Arah

Kebijakan Keuangan Daerah yang dimasukkan kedalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk itu sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan / kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan saya menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalaulah dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini terdapat hal-hal yang masih belum dapat memenuhi dan memuaskan Bapak dan Ibu kendati pun secara aturan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta bersama-sama berkerja sama memajukan Kabupaten Barito Selatan, dan terkhusus kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan, semoga kerjasama kita selama ini yang telah terjalin dengan baik dapat menjadi dasar landasan kuat bagi penerus kita dalam memajukan Kabupaten Barito Selatan menuju Dahani Dahanai Tuntung Tulus, seraya mengharapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa tetap mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya kepada semua pihak saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas petunjuk bimbingan dan sarannya selama kami memimpin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.

Buntok, Februari 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO SELATAN**



EDI SUHARTO, S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660306 198608 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten Barito Selatan.....	1
b. Data Geografis Wilayah	2
c. Jumlah Penduduk	5
d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa.....	6
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat daerah dan Pegawai Pemerintah.....	6
f. Realisasi Anggaran Belanja	9
1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	9
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	9
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	9
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	10
d. Kegiatan Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan. .	10
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	13
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	13
2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	13
2.2.1 Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	13
2.2.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target Kinerja.....	14
2.2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya	15
2.2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah	16
2.2.5 Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target.....	17
BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	20
BAB IV PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	21
BAB V PENUTUP.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas sebesar 702.009,90 hektar. Luas wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan 5,75 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ibu kota Barito Selatan terletak di Buntok yang terletak membujur disepanjang Sungai Barito. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah. Panjang sungai ini mencapai 900 km dengan rata-rata kedalaman 8 m dan dapat dilayari hingga 700 km serta melewati 5 kecamatan dari 6 kecamatan di Barito Selatan.

Ditinjau dari letaknya Kabupaten Barito Selatan dilalui oleh jalan nasional dan menjadi kota perlintasan yang menghubungkan antara Kota Palangkaraya (Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah) – Kabupaten Pulang Pisau – Kabupaten Kapuas – **Kabupaten Barito Selatan** – Barito Timur – Kota Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan). Dengan demikian lokasi Kabupaten ini memiliki lokasi strategis karena adanya pola pergerakan barang dan barang, sehingga menjadi kota transit, baik dari arah Kota Palangkaraya maupun Kota Banjarmasin. Sedangkan dilihat dari letak wilayah dalam kesatuan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan letak dan posisi yang demikian sehingga perkembangan wilayahnya cenderung menuju ke arah Provinsi Kalimantan Tengah.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 No.6) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No 101) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No 9), sebagai Undang-undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No.1820);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis posisi Kabupaten Barito Selatan terletak membujur atau memanjang Sungai Barito dengan letak Astronomis pada $1^{\circ} 20' \text{ LU}-2^{\circ} 35'$ dan $114^{\circ} \text{ BT}-115^{\circ} \text{ BT}$, dengan luas wilayah 702.009,9 km². Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas sebesar 702.009,90 hektar. Luas wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan 5,75 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Batas Administrasi Daerah

Batas Administrasi Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah wilayah utaranya berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara, wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Batola Provinsi Kalimantan Selatan, wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, wilayah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan pembentukan wilayah menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Tengah, luas Kabupaten Barito Selatan adalah 12.664 km². Namun setelah pemekaran pada tahun 2002 luas daerahnya menjadi 8.830 km².

Terkait luas Kabupaten Barito Selatan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 seluas 8.830 km², Namun berdasarkan perkembangan kesepakatan tata batas administrasi dengan beberapa kabupaten tetangga, antara lain Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Tengah serta update informasi data spatial secara real luas Kabupaten Barito Selatan yang digunakan dalam Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan periode tahun 2014-2034 dengan luas wilayah 702.009,9 hektar.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/329/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan seluas 702.009,9 hektar.

Tabel 1. Luas kecamatan Kabupaten Barito Selatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	% terhadap luas Kabupaten Barito Selatan
1	Jenamas	662,16	9,43
2	Dusun Hilir	1.369,73	19,51
3	Karau Kuala	825,23	11,76
4	Dusun Selatan	1.133,47	16,15
5	Dusun Utara	1.271,64	18,11
6	Gunung Bintang Awai	1.757,86	25,04
Jumlah		7.020,09	100

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Barito Selatan

2. Tofografis dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan dataran rendah di Kabupaten Barito Selatan berada di sepanjang alur Sungai Barito yang berkisar antara 0 – 4 meter dari permukaan laut, kecuali wilayah perbukitan yang merupakan daerah berkapur terletak di sebelah timur di Kecamatan Gunung Bintang Awai dan daerah rawa-rawa tersebar di seluruh wilayah.

Pada bagian tengah dijumpai perbukitan dengan variasi tofografi dari landai sampai miring, dengan intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Bagian wilayah utara merupakan rangkaian

pengunungan dengan dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur. Kabupaten Barito selatan berasal dari formasi-formasi geologis yang tergolong tua. Berdasarkan formasi batuanya, potensi kesuburan tanah di Kabupaten Barito Selatan tidak tinggi. Penyebaran formasi batuanya terdiri dari : Aluvium, endapan sungai dan laut, wilayah berawa dan bergambut, batuan sedimen yang kaya akan mineral kuarsa. Selain itu terdapat batuan sedimen klasik, mineral kuarsa dengan sedikit material vulkanik, batuan beku, batuan vulkanik tua, menghasilkan tanah yang kaya unsur hara dan batuan metamorf.

Jenis tanah daerah selatan berbeda dengan jenis tanah yang terdapat pada daerah hulu utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Sehingga kondisi tersebut berpengaruh pada jumlah sebaran hunian penduduk, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Bangunan Rumah	Keterangan
1.	Jenamas	2.322	
2.	Dusun Hilir	2.524	
3.	Karau Kuala	3.939	
4.	Dusun Selatan	16.704	
5.	Dusun Utara	4.253	
6.	G.B.Awai	1.908	
Total Rumah		31.650	

c. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Barito Selatan hingga tahun 2023 berjumlah 135.966 Jiwa yang menyebar di 6 Kecamatan, untuk jelasnya dapat dilihat pada table-tabel di bawah ini :

Tabel 3. Jumlah Kepala Keluarga menurut Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

No.	Kabupaten	Jumlah Kepala Keluarga	Keterangan
1.	Barito Selatan	44.873	
	<i>Total</i>	44.873	

Sumber : Data Dukcapil Tahun 2023

Tabel 4. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)*		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Jenamas	4.512	4.301	8.813
2.	Dusun Hilir	8.426	7.819	16.245
3.	Karau Kuala	7.977	7.597	15.574
4.	Dusun Utara	8.786	8.181	16.967
5.	G. Bintang Awai	10.104	9.497	19.601
6.	Dusun Selatan	29.743	29.023	58.766
	Jumlah	69.548	66.418	135.966

Sumber : Data Dukcapil Tahun 2023

Tabel 5. Jumlah Kepala Keluarga menurut Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Jenamas	2.929
2.	Dusun Hilir	5.308
3.	Karau Kuala	5.199
4.	Dusun Utara	5.574

5.	Gunung Bintang Awai	6.387
6.	Dusun Selatan	19.476
<i>Total</i>		44.873

Sumber : Data Dukcapil Tahun 2023

d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Barito Selatan hingga tahun 2023 terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, 86 (sembilan puluh tiga) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan, untuk jelasnya dapat dilihat pada table-tabel di bawah ini :

Tabel 5. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Ibu Kota Kecamatan
1.	Jenamas	1	4	Rantau Kujang
2.	Dusun Hilir	1	9	Mangkatip
3.	Karau Kuala	1	10	Bangkuang
4.	Dusun Utara	1	19	Pendang
5.	Gunung Bintang Awai	-	21	Tabak Kanilan
6.	Dusun Selatan	3	24	Buntok
Jumlah		7	86	

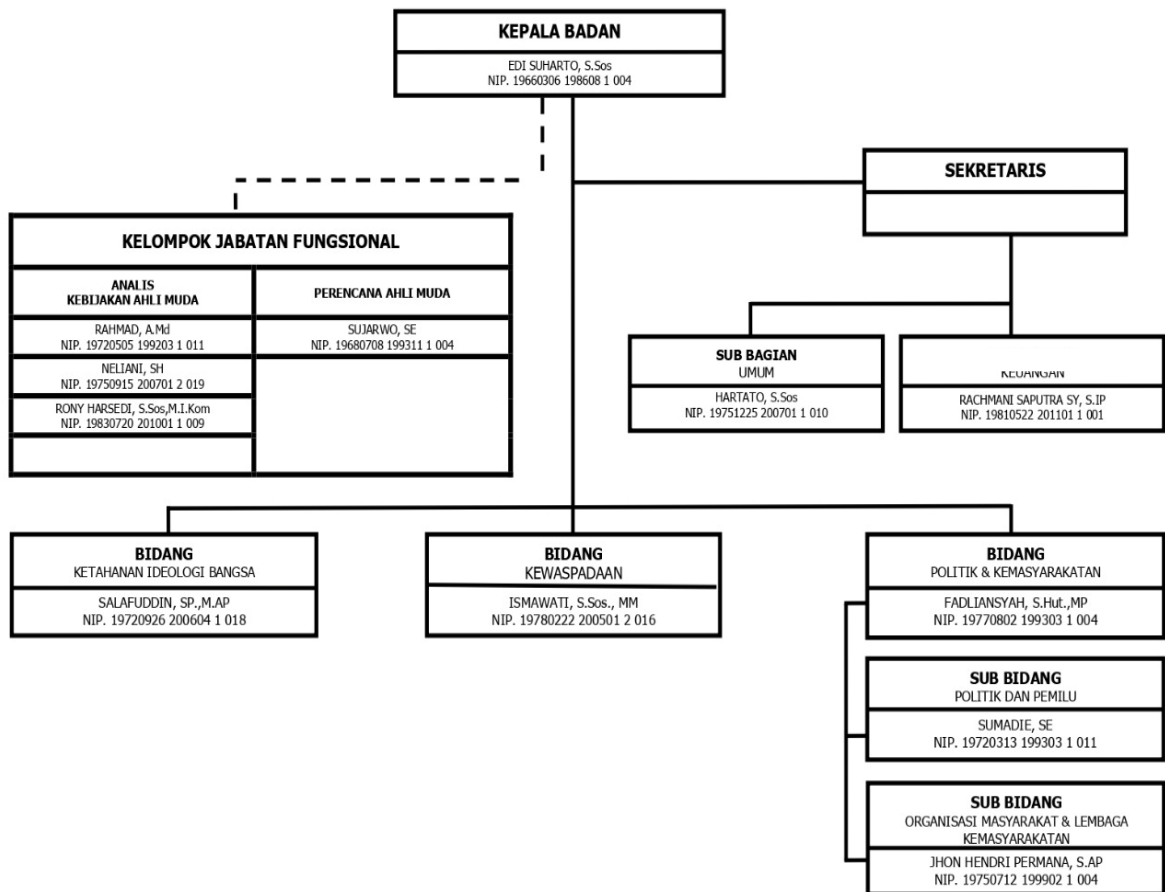
Sumber : Data Bagian Pemerintahan Setda Kab. Barsel Tahun 2023

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito yang melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 16 Dinas, 5 Badan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan 6 Kecamatan.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO SELATAN**



Tabel 6. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No.	Ijazah	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	Pasca Sarjana (S-2)	5 Orang
2.	Sarjana (S-1)	10 Orang
3.	Sarjana Muda (D- III)	1 Orang
4.	SLTA / Sederajat	4 Orang
5.	Pegawai Tidak Tetap Sarjana (S-1)	6 Orang
6.	Pegawai Tidak Tetap SLTA/Sederajat	14 Orang
	Jumlah	40 Orang

Tabel 7. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Ruang

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	Golongan IV	4 Orang
2.	Golongan III	13 Orang
3.	Golongan II	3 Orang
	Jumlah	20 Orang

Tabel 8. Jumlah Pegawai Menurut Eselonering

No.	Eselon	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	Eselon II.B	1 Orang
2.	Eselon III.A	0 Orang
3.	Eselon III.B	3 Orang
4.	Eselon IV.A	4 Orang
	Jumlah	8 Orang

Tabel 9. Rincian Keadaan Peg. Badan Kesbang dan Politik Kab. Barsel Tahun 2023

NO.	Jenjang	Jumlah Orang	Golongan																Jlh	
			I				II				III				IV					
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I.	Pejabat Struktural																			
	- Eselon II.B																	1		1
	- Eselon III.A																			0
	- Eselon III.B													1	2					3
	- Eselon IV.A													4						4
	Jumlah													5	2			1		8
II.	Pejabat Fungsional												1		4					5
	Jumlah												1		4					5
III.	Pelaksana / Struktural																			
	- S2																			
	- S1												2		2					4
	- D.III																			
	- SLTA									3										3
	- SLTP																			
	- SD																			
	Jumlah									3		2		2						7
IV	Pegawai Tidak Tetap																			
	- S1											6								6
	- SLTA						14													14
	Jumlah											6								20
	Jumlah Total						14			3		6	3		11	2		1		40

f. Realisasi Anggaran Belanja

No	Urusan Wajib	Belanja Operasi				Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Presentase (%)	SKPD Pelaksana
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Hibah	Belanja Modal				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bakesbangpol	2.536.107.141	11.414.552.753	23.975.954.500	410.989.550	38.337.604.124	31.363.644.013	81,81	Bakesbangpol

1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis

Memperhatikan sumber daya daerah yang ada dengan memperhatikan penataan dan memantapkan kelembagaan sehingga benar-benar mampu mengembangkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan.

b. Visi dan Misi

1. Visi

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu :

“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”

2. Misi

Penjabaran dan perwujudan visi pembangunan tersebut dilakukan melalui 5 misi pembangunan meliputi:

1. **Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan;**
2. **Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global;**
3. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi;**
4. **Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing;**
5. **Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.**

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Khusus untuk tahun 2023 beberapa sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercermin dalam Program prioritas berdasarkan Urusan Pemerintahan sebagai berikut :

NO	PROGRAM	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
		Target Kinerja	Pagu Anggaran	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Target Kinerja	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PROGRAM PENUNJUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	2.889.148.128	100%	2.889.148.128	100%	2.889.148.128	100%	2.889.148.128
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	100%	123.814.250	100%	123.814.250	100%	123.814.250	100%	123.814.250
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100%	1.842.347.000	100%	1.842.347.000	100%	1.842.347.000	100%	1.842.347.000
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100%	548.949.800	100%	548.949.800	100%	548.949.800	100%	548.949.800
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100%	59.234.340	100%	59.234.340	100%	59.234.340	100%	59.234.340

d. Kegiatan Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

No.	Program / Sub Kegiatan / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	
		Murni	Perubahan
1	2	3	4
I.	PROGRAM PENUNJUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	39.961.000,-	82.516.600,-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.536.107.141,-	2.536.107.321,-
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.538.040,-	16.538.040
3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,-	52.000.000
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.977.750,-	6.977.750,-

3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	7.707.000,-	7.707.000,-
3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.893.400,-	39.893.400,-
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.138.220,-	163.138.220,-
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,-	3.000.000,-
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.709.200,-	46.203.600,-
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	315.000.000,-	256.950.000,-
5.	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,-	10.000.000,-
II.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	13.000.000,-	13.000.000,-
1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15.810.000,-	15.810.000,-
1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	9.033.427.733,-	9.033.427.733,-
1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	29.856.000,-	29.856.000,-
1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	36.140.000,-	36.140.000,-
III.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.250.000,-	12.250.000,-
1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.787.850.000,-	1.812.849.820,-
1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	32.627.000,-	57.627.000
1.4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	19.620.000,-	19.620.000,-

	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.250.000,-	6.750.000,-
1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10.318.329.500,-	22.238.329.500,-
1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	16.738.400,-	41.738.400,-
V.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.549.780,-	2.549.780,-
1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14.235.024,-	14.235.024,-
1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	42.388.966,-	42.388.966,-
1.4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.790.000.000,-	1.740.000.000,-
	Jumlah Total	26.328.104.124,-	38.337.604.124,-

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan tidak ada Program Capaian Kinerja Makro.

2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.2.1 Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2023 telah menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran (Indikator Kinerja Utama/IKU) yang ingin dicapai tiap tahun yang juga dituangkan dalam perjanjian kinerja. Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah.

Berdasarkan kebijakan pembangunan tersebut diatas, kemudian menjadi dasar pengembangan program utama yang dilaksanakan pada tahun 2023. Sebagai tindak lanjut dari ***Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.***

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 91	Sangat Tinggi
2	75,1 – 90,0	Tinggi
3	65,1 – 75,0	Sedang
4	50,1 – 65,0	Rendah
5	$\leq 50,0$	Sangat Rendah

Sumber : *Permendagri No. 54 Tahun 2010*

Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut :

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	B
2.	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat	Persentase gangguan ketertiban umum yang tertangani	85%
		Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP Aktif (persen)	100%

2.2.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target Perjanjian Kinerja

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	B	Masih dalam tahap evaluasi
2.	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat	Persentase gangguan ketertiban umum yang tertangani	85%	100%
		Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP Aktif (persen)	100%	100%

2.2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Capaian 2022
1	Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah guna Meningkatkan Kegiatan Pembangunan Pemerintahan Kabupaten/Kota.	100%	98,90
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	100%	99,88
3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Sosial.	100%	99,99
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Terlaksananya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	100
5	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	99,63
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100%	99,99

Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian 2023
1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	B	Masih dalam tahap evaluasi
2.	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat	Persentase gangguan ketertiban umum yang tertangani	85%	100%
		Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP Aktif (persen)	100%	100%

Capaian Kinerja Tahun 2023

2.2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan masyarakat kalimantan tengah yang paham dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	B	B	B	B
2		Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat	Persentase gangguan ketertiban umum yang ditangani	85	85	90	100
			Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (Persen)	100	100	100	100

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah 2023-2026

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian 2023
1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	B	Masih dalam tahap evaluasi
2.	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat	Persentase gangguan ketertiban umum yang tertangani	85%	100%
		Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP Aktif (persen)	100%	100%

Capaian Kinerja Tahun 2023

2.2.5 Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target

1. Sasaran kesatu didukung dengan 1 (satu) program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan atas penilaian LAKIP 2022 hanya mendapat kriteria CC dan akan diperbaiki pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk Tahun 2023. Data bersumber dari Laporan Hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.
2. Sasaran kedua didukung dengan 5 (lima) program meliputi aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, dan Hankam. Supaya setiap potensi konflik tidak menjadi konflik atau untuk menjaga kondusifitas Kabupaten Barito Selatan dalam mendukung Barito Selatan yang humanis maka perlu pembinaan ideologi dan Politik melalui Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Dalam pembinaan ormas dan pemanfaatan data lingkup Ekonomi dan Sosial budaya sebagai bahan kebijakan pimpinan didukung Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; dan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam penanganan konflik yang terjadi dalam Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial untuk monitoring terkait isu Pertahanan dan Keamanan.

Kesimpulannya yaitu Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase gangguan ketertiban umum yang tertangani dan Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif dengan capaian kinerja 100%. Capaian indikator ini dihitung dari formula penghitungan yaitu Jumlah kejadian yang ditangani berbanding dengan jumlah kejadian berpotensi konflik dikali 100%. Jumlah konflik yang terjadi ini dilihat dari kejadian-kejadian yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan yang di analisis bisa menimbulkan potensi konflik di Kabupaten Barito Selatan. Jumlah konflik yang terjadi dan terdata pada bulan Januari hingga Desember

2023 terjadi 1 kejadian yang ditangani dan berpotensi konflik 1 kejadian. Capaian Indikator Ormas dihitung dari formula perhitungan yaitu jumlah Ormas, LSM dan OKP aktif berbanding dengan jumlah Ormas, LSM dan OKP yang terdaftar. Analisis tersebut meliputi uraian sebagai berikut :

1. Tercapainya persentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang tertangani Tahun 2023 dengan capaian 100%
2. Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif sebesar 100%.

Capaian tersebut diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah kasus yang tertangani Tahun 2023 : 1 Kasus

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \\ & \frac{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum yang tertangani Tahun N}}{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum yang terdata Tahun N}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{1} \times 100\% = \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Jumlah Ormas, LSM dan OKP aktif yang diberikan pembinaan Tahun 2023 :

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{\text{Jumlah Ormas, LSM dan OKP aktif Tahun N}}{\text{Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang terdaftar Tahun N}} \times 100\% \\ &= \frac{20}{20} \times 100\% = \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Demikian hasil Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 untuk Indikator tersebut adalah **100% atau Sangat Tinggi**.

Walaupun secara keseluruhan capaian kinerja sasaran tercapai dan berhasil namun masih ada hambatan dan kendala antara lain :

1. Masih rendahnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam rangka penataan kelembagaan, penyelenggaraan pembinaan Politik, Kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini;

2. Masih kurangnya penguatan dan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan;
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan/ peraturan dibidang politik;
4. Masih rendahnya pengawasan dini terhadap masalah-masalah sosial dan penanganannya;
5. Masih kurang Rasa Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat;
6. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM/Aparatur dalam penguasaan IPTEK.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi lainnya dalam rangka penataan kelembagaan, penyelenggaraan Pembinaan Partai Politik, kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini;
2. Peningkatan penguatan dan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan;
3. Peningkatan dan sosialisasi secara terus-menerus agar masyarakat dapat memahami tentang ketentuan/ peraturan dibidang politik;
4. Peningkatan dan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat;
5. Peningkatan pengawasan terhadap orang Asing; dan
6. Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam menguasai IPTEK melalui Pendidikan dan Pelatihan.

Pencapaian kinerja tahun 2023 senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Barito Selatan setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS
PEMBANTUAN

Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan tidak menerima tugas pembantuan.

BAB IV

PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak termasuk PERDA dalam pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB V

PENUTUP

Laporan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan satu instrumen dalam upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah kurun waktu 1 (satu) tahun, sekaligus sebagai bahan pembinaan dan pengawasan antara SKPD dengan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum kinerja Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, ditunjukkan dengan rata – rata Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan untuk Indikator tersebut adalah **100% atau Sangat Tinggi**. Meskipun demikian terdapat hambatan dan kendala namun langkah optimalisasi sumberdaya dilaksanakan agar proses pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar berhasil sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Barito Selatan setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 ini disampaikan Kepada Bupati Barito Selatan sebagai bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Buntok, Februari 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO SELATAN**



EDI SUHARTO, S.Sos

Pembina UtamaMuda (IV/c)
NIP. 19660306 198608 1 004